

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Pengembangan dan administrasi kota pintar meningkatkan efisiensi penggunaan, koneksi, pemantauan, dan pengelolaan berbagai sumber daya kota untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan mengoptimalkan layanan masyarakat. Atau dengan kata lain, sebuah kota yang dapat mengidentifikasi permasalahan di dalam kotanya dan mengelola berbagai sumber daya yang ada untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara efektif dan efisien guna memaksimalkan layanan yang ditawarkan kepada warganya (Conoras & Hikmawati, 2018) Istilah "kota pintar" mengacu pada konsep perencanaan kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan keberlanjutan, efisiensi komunikasi warga-pemerintah, kualitas hidup, dan elemen kehidupan perkotaan lainnya.

Kota pintar adalah konsep perencanaan kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan keberlanjutan, efisiensi komunikasi antara penduduk dan pemerintah kota, kualitas hidup, dan elemen kehidupan perkotaan lainnya (Komunikasi et al., 2019). Sebagai pelopor dalam dunia implementasi kota pintar, Singapura juga penting bagi pertumbuhan ekonomi digital global. Terobosan teknologi telah memungkinkan Singapura untuk menumbuhkan ekonominya. Dari sudut pandang teknologi, Singapura adalah negara yang relatif canggih secara keseluruhan. Perkembangan teknologi memiliki potensi untuk mempengaruhi banyak aspek eksistensi. Setiap negara menempatkan lebih banyak upaya untuk mengembangkan teknologi baru yang dapat digunakan untuk membantu program pemerintah, seperti yang ada di industri perbankan (Sudirman & Disemadi, 2022) Semua prefektur Jepang mengalami peningkatan yang stabil dalam jumlah kota pintar, dan semakin banyak bisnis menjadi anggota *Japan Smart Cities Institute*, sebuah organisasi nirlaba yang menghubungkan banyak industri yang berkontribusi terhadap pertumbuhan kota pintar negara itu. Jepang adalah simbol inovasi teknis, tetapi juga menuju kota pintar yang sangat ramah lingkungan dan pada akhirnya akan menjadi peradaban rendah karbon. Jepang adalah rumah bagi banyak kota pintar, seperti Toyota City, Kota Sains Keihanna (Prefektur Kyoto), dan Kota (Muniqar, 2016) . Jaringan internet tercepat di dunia ditemukan di kota pintar Korea Selatan, meskipun negara tersebut bergantung pada teknologi informasi untuk layanan publik (Wahju Tjahjo Saputro & Darminto, 2019).

Terlepas dari negara-negara industri Asia, konsep kota pintar juga diadopsi di negara-negara maju di Eropa. Dua kota tersebut adalah Barcelona dan London, keduanya telah secara aktif mempromosikan konsep "Smart city". Ide untuk meningkatkan standar hidup bagi penduduk setempat sambil mempromosikan ekonomi sumber daya dan kelestarian lingkungan. Theo Blackwell dinobatkan sebagai direktur digital pertama London pada September 2017, menandai dimulainya transformasi kota menjadi kota metropolis yang cerdas. Theo Blackwell bertanggung jawab untuk memelopori transformasi digital kota dan mengarahkan kembali aspek sosial dan ekonomi London ke arah model kota pintar. Alat paling ampuh di London untuk menciptakan kota pintar adalah teknologi (Shamsuzzoha, 2021)

Kota pintar di bagian selatan Eropa berikutnya, yaitu Barcelona, yang merupakan rumah bagi tim sepak bola terbesar di dunia yaitu FC Barcelona. Namun, tidak banyak orang yang menyadari bahwa Barcelona dinobatkan sebagai kota terpintar di dunia pada tahun 2015. Tujuan dari implementasi Smart City Barcelona adalah untuk menciptakan kota yang berkelanjutan dengan lingkungan bisnis yang kompetitif dan inovatif, kualitas hidup yang lebih baik, dan manajemen yang bertanggung jawab dan sistem yang terpelihara dengan baik dengan menghubungkan orang, informasi, dan aspek kota melalui teknologi modern. Untuk membangun komunitas yang berpendidikan, Kota Cerdas Barcelona juga berupaya meningkatkan kerja sama di seluruh sektor publik, perusahaan, dan nirlaba. Selain itu, kota pintar (Rahyaputra et al., 2021). Beberapa negara maju ini, yang ditemukan di Asia dan Eropa, adalah pemimpin dalam komunikasi dan teknologi, yaitu, negara-negara ini berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup warganya.

Di banyak negara berkembang di seluruh dunia, kota pintar sedang diterapkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa tahun terakhir telah melihat pemerintah Thailand dan kelompok-kelompok kepentingannya menjadi isu utama di beberapa negara berkembang ASEAN, termasuk Thailand. Program Thailand 4.0 pada dasarnya adalah rencana pembangunan berbiaya rendah yang bermaksud untuk mempromosikan kreativitas, inovasi, dan layanan kelas dunia dalam pembangunan kota pintar di Thailand, dengan teknologi digital modern berfungsi sebagai pilar utama. Badan Promosi Ekonomi Digital Thailand mendorong pengembangan kota pintar (Irvine et al., 2022). Pemerintah Thailand siap mendukung pembentukan kota pintar melalui penerapan kota pintar Badan Promosi Ekonomi Digital Thailand (DEPA). Tiga sistem penyampaian kota pintar sedang diterapkan oleh pemerintah

Thailand. Organisasi pemerintah dan asosiasi pemerintah yang sah akan dapat meningkatkan kapasitas dan efektivitasnya dengan bantuan alat penting ini.

Terlepas dari negara-negara yang sebelumnya maju dan berkembang, Indonesia, sebagai negara berkembang, saat ini mengalami apa yang disebut Revolusi Industri 4.0, yang berfokus pada digitalisasi dan penggunaan robot dan mesin secara ekstensif di semua operasi. Industri. Salah satu usulan yang didukung pemerintah. Smart City adalah gagasan untuk mengembangkan, menerapkan, dan menggunakan teknologi informasi di kota, termasuk sistem interaksi. Indonesia untuk mewujudkan proses digitalisasi pelayanan publik adalah konsep smart city (Saputra et al., 2022). Indonesia menggunakan terobosan teknologi untuk menciptakan kota pintar dengan menyesuaikan diri dengan revolusi Industri 4.0 di seluruh kotanya. Di Indonesia, penggunaan smart city masih terkonsentrasi di beberapa kota besar, khususnya di pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya (Rahman, 2018).

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan kementerian terkait memberikan pengakuan Smart City di Kota Bandung sebagai telah menerapkan program Smart City terbaik dalam kategori Smart Governance pada tahun 2022. Sesuai dengan orientasi strategis Kota Bandung, Smart City secara khusus bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan kota. Implementasi smart governance Kota Bandung, Bandung Command Center, dikatakan lebih maju dari Korea Selatan. Bandung Command Center adalah fasilitas unik yang dilengkapi dengan teknologi mutakhir untuk memantau akses ke layanan publik. Walikota menggunakan area ini untuk menonton "Blusukan digital" dan membuat penilaian tepat waktu mengenai apa yang sedang terjadi (Wibowo, 2018). Makassar, kota pintar diterapkan dengan fokus pada Internet of Things, kecerdasan buatan, dan big data, dengan tetap mempertimbangkan budaya lokal (Asaad & Rahman, 2021)

Kota Malang juga senantiasa melakukan penyesuaian dengan keadaan saat ini. Misalnya, mengadaptasi beragam sektor terhadap perkembangan teknologi saat ini. Ide kota pintar terus membantu memajukan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Namun, saat merancang desainnya, berbagai faktor harus dipertimbangkan. Misalnya kepadatan penduduk, indeks ketersediaan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan infrastruktur yang berkualitas (Akbaruddin, 2021) Terbentuknya Smart City di Kota Malang menunjukkan bagaimana pemerintah dapat menjadi model penerapan Smart City. Pertumbuhan sektor UMKM menjadi

salah satu ide ekonomi penerapan konsep Smart City Kota Malang, dan diharapkan dapat membaik di semua sektor (Pertiwi et al., 2023)

Konsep kota pintar sering diartikulasikan dalam beberapa aspek kehidupan perkotaan yang mendapat manfaat dari kemajuan teknologi dan inovasi. Dalam penerapannya, ide kota pintar menghubungkan berbagai faktor seperti infrastruktur, manusia, teknologi, ekonomi, pemerintahan, lingkungan, dan mobilitas. Dalam pelaksanaannya smart city memiliki dimensi utama sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan Smart City yaitu smart mobility, smart living, smart governance, smart environment, smart economy, and smart people (Sukmatama et al., 2019).

Sementara pada penelitian (Besar & Sumatera, 2019) Menekankan bahwa salah satu fondasi membangun smart city adalah peran pemerintah dalam merumuskan rencana, menetapkan regulasi terkait, perencanaan keuangan, membangun sistem dan infrastruktur berbasis teknologi, serta melaksanakan administrasi, yang berperan penting dalam pelaksanaan pengembangan smart city. pemerintah harus termotivasi untuk menciptakan smart city yang menawarkan penghuninya kualitas hidup yang tinggi serta pelayanan yang baik dan efisien. Mengacu pada penelitian (Beama et al., 2022). bahwa pejabat pemerintah daerah benar-benar melayani kepentingan masyarakat. Diperkirakan bahwa fenomena yang terlihat dalam terobosan teknologi saat ini akan berlaku untuk penerapan tata kelola yang cerdas. Pelayanan publik tidak lagi diberikan secara satu arah, melainkan masyarakat mengembangkan partisipasi yang secara bertahap melibatkan seluruh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Sebagai pengguna layanan publik, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pejabat pemerintah daerah benar-benar melayani kepentingan masyarakat.

Tata kelola yang cerdas sangat penting dalam melindungi gagasan kota pintar. Smart City adalah konsep sipil yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, kualitas hidup penduduk, dan bidang kehidupan sipil lainnya. Smart Governance merupakan konsep dasar untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan internet (Nursetiawan & Putra, 2021). Ide smart governance telah berhasil diterapkan di Kabupaten Sleman, Indonesia, sehingga menghasilkan pembangunan yang efektif dan efisien berdasarkan tata kelola, implementasi, dan manajemen (Nandyasari & Rahayu, 2019).

Layanan pemerintah didorong oleh layanan publik dan menggunakan berbagai data, informasi, dan teknologi informasi dan komunikasi terkini (TIK) untuk memberikan layanan

yang lebih cerdas dan berkualitas lebih tinggi kepada publik. Pemerintah perkotaan yang cerdas dibedakan oleh administrasi layanan publik perkotaan yang cerdas dan keterlibatan warga negara yang aktif. Ini menunjukkan penggunaan TIK oleh pemerintah untuk memfasilitasi pertukaran data lintas departemen dan menyediakan layanan pemerintah yang transparan dan berkelanjutan. Pelaksanaan rencana urbanisasi di Cina telah mengumpulkan lebih banyak perhatian terhadap tingkat pemerintahan yang cerdas. Kemajuan dan implementasi di bidang ini telah mengalami kemajuan. Tata kelola perkotaan yang cerdas menggunakan sistem perkotaan sebagai titik fokus untuk tata kelola dan memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun mekanisme pengambilan keputusan yang cerdas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan standarisasi, transparansi, dan efisiensi pelayanan publik perkotaan dengan memfasilitasi pertukaran terbuka antara pemerintah, pasar, dan masyarakat (Kang & Wang, 2020)

Tata kelola yang cerdas merupakan komponen penting dari Smart City dan berkelanjutan, dan hal ini semakin penting di perkotaan. Kroasia telah mengadopsi model pemerintahan cerdas yang didasarkan pada konsep ini. Model ini mencakup indikator-indikator yang mengukur partisipasi politik, seperti persentase pemilih di kota-kota setempat. Topik yang dibahas meliputi pemilu, keterlibatan masyarakat dalam perumusan anggaran, transparansi ekonomi seperti transparansi anggaran dan daftar layanan publik. Urbanisasi kota-kota di Kroasia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Ini bukan pertama kalinya kota dievaluasi dan dimasukkan ke dalam daftar yang secara khusus mengkaji pembangunan perkotaan. Salah satu evaluasi tersebut adalah Smart Urban Development Index, yang dirumuskan oleh sekelompok penulis. Saya melakukan penyelidikan ekstensif dan mengategorikan 25 kota dan pusat distrik utama di Kroasia menggunakan metodologi ESCR (Babić et al., 2022)

Tata kelola yang efektif mempunyai potensi untuk mendorong suatu wilayah menuju pembangunan yang lebih besar dan lebih maju dengan menggunakan tata kelola yang cerdas sebagai sarana untuk menetapkan peraturan dan regulasi yang inovatif. Pemerintah Kabupaten Sumenep, di bawah kepemimpinan kepala daerah, menetapkan langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan pertumbuhan kota-kota besar, memajukan perencanaan kota, dan meningkatkan kualitas layanan. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, masyarakat telah melihat transformasi dan kemajuan sosial yang signifikan, seperti penerapan program dan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas strategis dan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) dan inovasi dengan

memfasilitasi akses terhadap teknologi. Tata kelola yang efektif mempunyai kapasitas untuk mendorong suatu wilayah menuju pembangunan yang lebih besar dan lebih maju dengan menggunakan tata kelola yang cerdas sebagai sarana untuk menetapkan peraturan dan regulasi yang inovatif. Pemerintah Kabupaten Sumenep, di bawah kepemimpinan kepala daerah, menjamin terlaksananya langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan pembangunan kota-kota besar, memajukan perencanaan kota, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu tantangan dalam melayani masyarakat adalah beradaptasi terhadap perubahan signifikan dan perkembangan sosial. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan program dan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas strategis dan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) dan inovasi dengan memfasilitasi akses terhadap teknologi (Dzulhidayat, 2022)

Tata kelola cerdas Yogyakarta harus diperbarui di sejumlah bidang utama karena merupakan indikator kunci dalam pelaksanaan kota pintar. Tata kelola yang cerdas mencakup tiga elemen utama: menggunakan TIK dalam pemerintahan, mencapai keterbukaan dan transparansi dalam data, dan merancang kebijakan berdasarkan persyaratan publik. Untuk mempraktikkan elemen-elemen ini. Dalam rangka menjalankan Smart Governance, hal ini memaksa Pemerintah Daerah Jogja untuk mengembangkan sistem website (Putra et al., 2020) Pada penelitian (Myeong et al., 2018) Menganalisis faktor-faktor penentu pengembangan smart governance dengan menggunakan proses hirarki analitis menunjukkan bahwa pembahasan mengenai perbandingan proses smart governance lebih banyak dibandingkan pengembangan smart governance. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan faktor internal dan eksternal seperti berkembangnya tata kelola pemerintahan yang cerdas. Menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk memprioritaskan faktor pengembangan smart governance. Ada dua faktor penting dalam pengembangan smart governance: faktor internal yang terdiri dari partisipasi masyarakat, kepemimpinan dan infrastruktur, dan faktor eksternal yang terdiri dari revolusi industri keempat, kemauan politik dan pemangku kepentingan. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor dalam mengembangkan smart governance.

Konsep Kota Cerdas seharusnya mampu memberikan dukungan terhadap pelayanan dasar bagi masyarakat luas. Dalam implementasi pembangunan Kota Cerdas tidak dapat berpegang hanya pada aturan one size fits all akan tetapi harus menyesuaikan dengan kondisi karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Adanya kompleksitas tuntutan di perkotaan seperti masalah pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, kemacetan,

kemiskinan, kriminalitas, bencana alam harus dapat dicari solusinya dalam konsep Kota Cerdas (Beama et al., 2022).

Tata Kelola pemerintahan yang cerdas atau dikenal dengan Smart Governance merupakan salah satu domain studi yang menarik perhatian secara ilmiah dan mempengaruhi proses kebijakan. Smart Governance tidak terlepas dari penerapan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik, dengan berupaya untuk meningkatkan pengambilan keputusan melalui kolaborasi yang lebih baik diantara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan warga negara (Sarofah, 2022). Dalam mengimplementasikan konsep smart city, faktor penting dalam keberhasilan smart city adalah smart governance. Smart governance merupakan tata kelola pemerintah dengan tata kelola birokrasi yang cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan inovatif melalui kombinasi pemanfaatan perangkat berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta tata kelola yang kolaboratif. (Husna & Syaodih, 2022)

Perkembangan teknologi semakin pesat pada masa kini. Kemajuan ini juga ditandai dengan adanya internet sebagai ajang untuk bertukar informasi di seluruh dunia.. Perkembangan jaringan ini telah merubah paradigma dalam pemenuhan kebutuhan informasi yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu

Penelitian ini berfokus pada perbedaan indikator spesifik dalam penerapan smart governance di berbagai kota di Indonesia, serta di beberapa negara maju dan berkembang. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih luas berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti jadikan bahan referensi. Peneliti ingin menyempurnakan judul penerapan smart governance.

## **2.2 Kerangka Teori**

Kerangka teoritis melibatkan pemilihan teori yang akan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan. Dengan kata lain, ini memerlukan menggambarkan kerangka kerja atau teori yang akan digunakan untuk menganalisis masalah yang dinyatakan. Penelitian ini akan dipandu oleh teori-teori yang akan berfungsi sebagai dasar untuk analisis kritis dan menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi masalah saat ini. Berikut ini adalah teori-teorinya:

### **2.2.1 Smart City**

Kota Cerdas adalah strategi holistik yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi perkotaan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengidentifikasi penghematan biaya di dalam kota. Cohen memberikan definisi kota pintar yang lebih tepat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan di masa depan. Kota Cerdas mengoptimalkan penggunaan TIK untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal, sehingga menghasilkan penghematan biaya dan energi. Hal ini meningkatkan pemberian layanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi dampak ekologis melalui bantuan cerdas. Kota yang berkelanjutan.

Smart city merupakan pendekatan universal untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan suatu kota, meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut, suatu strategi yang komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan efektivitas operasional kota, meningkatkan kualitas hidup kota tersebut. masyarakat, dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Smart city merupakan sebuah konsep dalam kota besar yang didirikan untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi di kota besar, serta mengelola potensi yang ada di kota besar. berbasis teknologi informasi. Dikatakannya, smart city terdiri dari enam indikator utama, yaitu: Smart People, Smart Economy, Smart Environment, Smart Governance, Smart Living, dan Smart Mobility. Keenam indikasi inilah yang menjadi kunci rumusan gagasan Smart City. Dengan memasukkan indikator-indikator dalam formulasinya yang dikumpulkan dari seluruh entitas perkotaan.

Pembentukan kota cerdas, yang difasilitasi oleh penggunaan teknologi informasi, terutama didorong oleh teknologi. Oleh karena itu, gagasan kota pintar sangat terkait dengan teknologi. Kota pintar dibentuk oleh tiga faktor utama: struktur organisasi, tata kelola kelembagaan, sumber daya manusia, dan teknologi. Dengan menggabungkan ketiga komponen ini, efisiensi kota pintar dapat ditingkatkan. Konsep mendasar yang mendorong penerapan kota pintar adalah menciptakan sistem yang bermanfaat dan transparan, memfasilitasi akses informasi yang cepat dan langsung bagi penduduknya.

Konsep Kota Cerdas memerlukan pendekatan holistik yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan standar hidup, dan memperkuat perekonomian lokal. Definisi Cohen tentang kota pintar adalah kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan cara yang cerdas dan efektif untuk mencapai penghematan biaya dan energi, meningkatkan layanan dan kualitas hidup, meminimalkan dampak lingkungan, dan

mendorong inovasi dan keberlanjutan ekonomi. Boyd Cohen, pakar kota pintar, telah merancang enam indikator untuk menerapkan solusi kota pintar guna mengatasi permasalahan perkotaan yang rumit. Indikator-indikator tersebut adalah Smart Governance, Smart Environment, Smart Living, Smart Mobility, Smart Economy, dan Smart Brand. Penerapan kota pintar memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek keberadaan sosial yang dapat berdampak signifikan pada kehidupan komunal, aksesibilitas yang nyaman, dan kesejahteraan masyarakat (Robert & Brown, 2021). Masing-masing dari dimensi smart city jelas memiliki fungsi berbeda. Misi kami adalah menciptakan solusi yang kreatif, komprehensif, dan berkelanjutan. Berikut keenam dimensi smart city yaitu :

1) *Smart Governance*

Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dimana teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efisien di pemerintahan daerah untuk meningkatkan kolaborasi dan produktivitas, mendukung filantropi dan integrasi lokal, dan memastikan administrasi birokrasi yang efektif dalam penyediaan layanan publik.

2) *Smart Branding*

Tujuan dari citra kota ini adalah untuk meningkatkan keterikatan masyarakat dan mempromosikan kawasan tersebut secara lokal dan nasional, sekaligus meningkatkan daya saing melalui organisasi yang efisien dan memanfaatkan ekosistem pariwisata.

3) *Smart Economy*

Tujuannya adalah untuk membangun ekosistem mandiri yang secara efektif memfasilitasi upaya perekonomian masyarakat, selaras dengan sektor ekonomi paling makmur dan menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap transformasi yang dibawa oleh era digital. Kampanye Less Cash Society bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan keuangan, sehingga menciptakan kondisi yang diperlukan bagi ekosistem industri untuk mencapai daya saing, ketahanan, dan kesejahteraan masyarakat.

4) *Smart Living*

Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang layak huni sekaligus menjamin ketersediaan transportasi dan infrastruktur kesehatan yang komprehensif.

### 5) *Smart Society*

Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan di mana masyarakat manusia berkembang dengan mempromosikan pembentukan komunitas yang menarik, saling berhubungan, dan efisien. Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk membangun suasana sosial yang aman dan sistem pendidikan yang sangat efisien.

### 2.2.2 *Smart Governance*

Penerapan tata kelola cerdas dalam konteks kota pintar ini memperkenalkan inovasi dengan membangun pelayanan publik terpusat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Manajemen cerdas merupakan komponen kota besar cerdas yang secara khusus berfokus pada praktik manajemen. Kami mengantisipasi bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan memfasilitasi pembangunan pemerintahan yang tenang, rapi, dan sejahtera. Oleh karena itu, kualitas dan besaran layanan publik diharapkan meningkat secara signifikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang diperlukan agar teknologi informasi dapat digunakan secara efektif dalam administrasi publik, menjamin efisiensi, kolaborasi, daya saing, pelestarian pengetahuan yang melekat, dan integrasi. Langkah-langkah regulasi dapat bermanfaat dalam bidang pelayanan publik.

Tata kelola yang cerdas dapat dilihat sebagai upaya pemerintah dalam mengimplementasikan inisiatif kota pintar. Manajemen cerdas harus memiliki kemampuan untuk mengadopsi teknik penyampaian layanan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan komunikasi. Untuk secara konsisten memberikan layanan yang luar biasa kepada masyarakat umum. Tujuan dari Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas adalah untuk membangun struktur yang sesuai dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mengatur otoritas kota secara efisien dan kolaboratif, sekaligus mengintegrasikan dan mendukung pengetahuan masyarakat.

Penerapan tata kelola yang cerdas erat kaitannya dengan tata kelola yang efektif, yang memungkinkan pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat, efektif, efisien, dan transparan secara efisien dan efisien. Kemajuan teknologi meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mengandalkan teknologi informasi. Manajemen cerdas menggabungkan sistem layanan dan mengkonsolidasikan penyediaan layanan publik. Hasilnya adalah sistem manajemen canggih yang secara efektif dapat memfasilitasi dan mengizinkan akses terhadap layanan.

Tata kelola yang cerdas dapat dimanfaatkan di tingkat lokal untuk membuat, memperkenalkan, dan melaksanakan kebijakan, inisiatif, dan solusi untuk kota pintar. Model pemerintahan yang beroperasi melalui teknologi digital. Melalui penggabungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan manajemen kolaboratif. Tata kelola yang efektif memberdayakan pemerintah untuk menerapkan pendekatan yang lebih optimis dalam mencapai tujuan saat ini. Informasi mengenai sumber daya manusia dan sumber daya lain yang umum digunakan dapat dimanfaatkan dalam manajemen cerdas untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan mencapai hasil yang selaras dengan kebutuhan seluruh masyarakat (Sarofah, 2023).

Elemen penting dari kota pintar melibatkan pemberian prioritas pada solusi administratif, khususnya melalui penggunaan manajemen cerdas. Menegakkan kegiatan pemerintahan dan pengelolaan masyarakat yang adil, beretika, dan mudah dipahami. Pemerintahan yang cerdas mencakup komponen-komponen kebijakan seperti pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyediaan layanan publik dan sosial untuk menjamin transparansi, memungkinkan warga negara mengakses semua informasi yang disebarluaskan oleh pemerintah. Tujuan kerjasama pemerintah-masyarakat adalah untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang menjamin lingkungan hidup yang tentram, sejahtera, dan asri, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Manajemen cerdas terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Partisipasi warga negara dalam mengumpulkan informasi atau mengambil keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung
2. Baik pemerintah kota maupun pemerintah desa harus transparan agar masyarakat dapat menyumbangkan banyak informasi dan kebijaksanaan
3. Perlu mampu meningkatkan standar pelayanan publik karena penerapan implementasi smart city, yang tidak diragukan lagi akan terjadi memanfaatkan teknologi informasi apapun berupaya mencapai atau menawarkan sistem informasi berbasis situs web, dan layanan dan memerlukan keberadaan database yang teratur dan terstruktur untuk menampung semua data selain rincian tentang layanan publik.

### **2.2.3 Faktor-Faktor Penentu Pelaksanaan Smart Governance**

Penerapan Smart Governance yang efektif memerlukan pertimbangan matang terhadap sejumlah faktor, termasuk sumber daya manusia, yang dapat menjadi kendala. Selain itu, sejumlah faktor lain juga dapat berdampak pada penerapan Smart Governance. Dari hasil

kajian *Harvard JFK School of Government* ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh, masing-masing elemen sukses tersebut adalah support, capacity, dan value. Dari masing-masing elemen tersebut, terbagi lagi menjadi beberapa sub elemen, yang menjelaskan secara rinci faktor yang mempengaruhi perkembangan dari pelaksanaan Smart Governance.

### **1. Support**

Dukungan yang diharapkan dari elemen ini tidak hanya dari kata-kata atau sekedar tindakan, tetapi perlu adanya:

#### **a) Adanya Undang-Undang atau Peraturan Yang Mengatur**

Mewujudkan dan mempengaruhi Tata Kelola Cerdas yang lebih fokus dan terintegrasi sangat bergantung pada Undang-Undang. Perundang-undangan tersebut menciptakan kerangka kerja yang diperlukan untuk menjamin efisiensi operasional Tata Kelola Pemerintahan Cerdas, sehingga menghasilkan peningkatan keluaran, keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan peningkatan layanan masyarakat.

#### **b) Alokasi Sumber Daya Manusia**

Penerapan tata kelola pintar sebagian besar didukung oleh sumber daya manusia (SDM). Kombinasi sumber daya manusia yang berpengetahuan di bidang TIK dan *Smart Governance* akan memungkinkan penerapan smart governance yang lebih baik lagi.

#### **c) Tersedianya Infrastruktur Yang Mendukung**

Infrastruktur yang berfungsi sebagai landasan teknologi untuk penerapan solusi tata kelola cerdas dalam mewujudkan *Smart Governance* yang terintegrasi sangat penting dalam pengembangan aspek *Smart Governance*. Jika infrastruktur yang diperlukan sudah tersedia, pemerintah dapat mengembangkan dan melaksanakan layanan digital, aplikasi cerdas, analisis data, dan platform interaksi publik.

## 2. *Capacity*

Kemampuan pemerintah untuk mengaktualisasikan tata kelola cerdas dalam pengertian ini disebut sebagai kapasitas. Pemberdayaan pemerintah dapat berupa dukungan infrastruktur dan tenaga kerja terlatih, yaitu:

### a) **Tersedianya Anggaran Untuk Mewujudkan *Smart Governance***

Anggaran memainkan peran penting dalam memungkinkan penerapan *Smart Governance*. Dengan mengalokasikan dana yang diperlukan, pemerintah dapat menjamin bahwa solusi TIK yang cerdas dapat dikembangkan, diterapkan, dan dipelihara.

### b) **Sarana dan Prasarana untuk mewujudkan *Smart Governance***

Salah satu syarat mendasar penerapan *smart governance* adalah infrastruktur dan fasilitas. Infrastruktur dan panduan yang cukup dan berkualitas tinggi memberikan landasan teknologi untuk penerapan tata kelola yang cerdas. Pemerintah dapat secara efisien menciptakan, menerapkan, dan mengawasi solusi TIK dengan infrastruktur dan panduan yang tepat. dengan bijaksana.

## 3. *Value*

Support dan *capacity* adalah elemen yang dapat dipenuhi oleh pemerintah, dalam bentuk menyediakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. pada aspek *value* ini lebih kepada masyarakat yang mana masyarakat yang merasakan dan menggunakan langsung dari program *smart governance* yang telah dibuat.